

KUASA NARASUMBER BERITA DALAM MEMBANGUN NARASI BERITA KORUPSI DI PERS LOKAL

Herlina Kusumaningrum¹

Abstract

Researchers have the assumption that local press Jawa Pos Radar Madura in the proclamation of the Fuad Amin Imron corruption cases tend to be predominantly controlled by news sources. Therefore, this research tries to do multiplication related anyone news sources chosen; how the relationship between news resources with entwined Fuad Amin; based on the consideration of what are the resources selected news. To discover it to researchers using a series of methods. First, the resource calculation is done in quantity as well as the number of frequencies in the news. Second, do this resource. Third, doing a reading of the news narrative built JPRM. Fourth, do an in-depth interview about the reasons the consideration of the election of the speaker. Research findings show that the neutral and pro dominant speaker is elected as news sources than news sources cons. Value judgment of news, journalists and security factor is the desire to prevent horizontal conflicts became the cornerstone of the election of the news sources. The research also found that the narrative of JPRM is that Fuad Amin's innocence, even he considered meritorious large Bangkalan.

Key word: Corruption, News sources, Local press, News narration

Abstrak

Peneliti memiliki asumsi bahwa pers lokal Jawa Pos Radar Madura dalam pemberitaan kasus korupsi Fuad Amin Imron cenderung dominan dikendalikan oleh narasumber berita. Karena itu, penelitian ini berusaha melakukan pengalihan terkait siapa saja narasumber yang dipilih; bagaimana relasi yang terjalin antara narasumber berita dengan Fuad Amin; berdasarkan pertimbangan apa saja narasumber berita dipilih. Untuk meguak hal itu peneliti menggunakan serangkaian metode, yakni. *Pertama*, dilakukan penghitungan narasumber secara kuantitas maupun jumlah frekuensi kemunculan di dalam berita. *Kedua*, melakukan pengkategorian narasumber. *Ketiga*, melakukan pembacaan narasi berita yang dibangun JPRM. *Keempat*, melakukan wawancara mendalam mengenai alasan pertimbangan pemilihan narasumber berita. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa narasumber netral dan pro dominan dipilih dibandingkan narasumber kontra. Pertimbangan nilai berita, prinsip tingkatan narasumber berita, faktor keamanan jurnalis dan keinginan mencegah konflik horisontal menjadi landasan pemilihan narasumber berita. Penelitian juga menemukan bahwa narasi yang diketengahkan JPRM adalah bahwa Fuad Amin tak bersalah, bahkan ia dianggap berjasa besar bagi masyarakat Bangkalan.

Kata kunci: Korupsi, Kuasa narasumber berita, Pers lokal, Narasi berita.

¹ Herlina Kusumaningsrum, Dosen Ilmu Komunikasi, FISIP Untag Surabaya

Pendahuluan

Beberapa akademisi menduga bahwa semenjak desentralisasi diimplementasikan praktik korupsi di daerah kian subur. Pengesahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dinilai memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran mereka. Kewenangan yang lebih besar ini dianggap membuka peluang bagi terjadinya tindak korupsi di daerah. Tetapi perlu juga disadari bahwa korupsi di Indonesia tidak serta merta muncul pasca implementasi desentralisasi.

Praktik ini telah lama ada, namun, memang ketika Orde Baru berkuasa tidak terdapat data valid mengenai korupsi akibat pemerintahan yang otoriter dan lemahnya penegakan hukum. Sehingga yang pasti dapat disimpulkan adalah desentralisasi memberikan latar baru bagi praktik korupsi di tingkat lokal, yakni berkaitan dengan pergeseran relasi kekuasaan antara pusat – daerah, mendorong kembalinya kekuasaan elit lokal atau raja-raja kecil, berkuasanya kembali orang kuat lokal (*local strongman*). Perubahan ini akhirnya memberikan latar belakang yang amat beragam atas praktik tindak korupsi yang terjadi di tingkat lokal (Rinaldi, Purnowo & Damayanti, 2007: 2-3).

Dalam kondisi desentralisasi yang memberikan latar baru bagi praktik korupsi sebagaimana telah dipaparkan, pers lokal menjadi salah satu lembaga yang memiliki sebuah tanggung jawab untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas terhadap berbagai lembaga sosial, politik maupun lembaga-lembaga ekonomi yang dapat melakukan monopoli kekuasaan politik, budaya maupun ekonomi di tingkat lokal.

Lebih spesifik terkait korupsi, pers lokal diharapkan mampu memberikan informasi terkait pencegahan korupsi, menguak aktor-aktor yang terlibat dalam suatu tindak korupsi, serta menyuguhkan informasi mengenai dampak-dampak sistemik apa saja yang disebabkan oleh suatu tindak korupsi melalui berita-berita yang mereka produksi. Dengan adanya informasi mengenai berita korupsi tersebut diharapkan

dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah maupun masyarakat sipil bahwa korupsi merupakan tindakan kriminal yang amat merugikan.

Pers lokal alih-alih menyuguhkan berita korupsi yang mampu memberikan penyadaran bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam praktiknya peneliti menduga pers lokal justru memproduksi berita yang dapat membuat pandangan masyarakat kabur terhadap kasus korupsi yang terjadi. Bahkan cenderung menyuguhkan persepektif pihak tertentu saja.

Mengenai hal itu, peneliti melakukan telaah terhadap berita korupsi yang diproduksi oleh pers lokal *Jawa Pos Radar Madura* berkenaan dengan kasus korupsi suap jual beli gas alam yang dilakukan Fuad Amin Imron—mantan Bupati Kab. Bangkalan. Terungkapnya kasus tersebut mengejutkan sebagian masyarakat, khususnya masyarakat Bangkalan. Karena Fuad Amin dianggap sebagai sosok kharismatik yang dihormati. Ia adalah cicit dari KH. Syaikhona Muhammad Kholil (1833-1834), ulama tersohor di Indonesia.

Peneliti berasumsi bahwa pers lokal *Jawa Pos Radar Madura* dalam pemberitaan kasus korupsi Fuad Amin cenderung dominan dikendalikan oleh narasumber berita. Karena itu, penelitian ini berusaha melakukan pengalihan terkait siapa saja narasumber yang dipilih; bagaimana relasi yang terjalin antara narasumber berita dengan Fuad Amin; berdasarkan pertimbangan apa saja narasumber berita dipilih.

Tinjauan Pustaka

Pers Lokal: Definisi dan Peran

Hughes (2001:11) berdasarkan penelitiannya di Indonesia, mengkategorikan pers yang berkembang di Indonesia menjadi tiga kategori, yakni pers lokal, regional dan nasional. Pers lokal menurutnya adalah surat kabar atau koran yang terbit di daerah tertentu. Mayoritas berita yang dimuat berisi mengenai daerah tersebut. Serta kantor pusat juga berlokasi di daerah tersebut. Surat kabar dalam kategori ini biasanya tidak dapat dibeli di daerah lain, kecuali dengan berlangganan. Contohnya Malang Post dan Jawa Pos Radar Madura.

Sedangkan yang dimaksud dengan pers regional adalah surat kabar yang terbit di kota (biasanya ibukota provinsi) dan disebarikan ke daerah lain yang berada di luar wilayah kota itu, tetapi tidak disebarikan ke seluruh wilayah Indonesia. Contohnya Surabaya Post, dan Surya. Terakhir pers nasional adalah surat kabar yang terbit di daerah tertentu dan disebarikan ke sebagian besar di wilayah Indonesia. Contohnya seperti Kompas dan Media Indonesia. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan pers lokal adalah media berita yang dikelola, terbit, atau beroperasi di daerah. Artinya kantor pusat berlokasi di daerah tertentu dan mayoritas berita yang dimuat adalah berita mengenai daerah tersebut karena aspek kedekatan (*proximity*).

Pers Lokal memiliki peranan yang amat penting bagi demokratisasi di tingkat lokal. Adapun beberapa peranan pers lokal menurut Puji Rianto (2006) dan Alderige (2007) di antaranya adalah:

Pertama, melaksanakan peran pengawasan atau sering juga disebut 'watchdog'. Peran *watchdog* secara sederhana menempatkan media dan jurnalis sebagai pemantau kekuasaan pemerintah, yakni peran kritis membuat manajemen dan proses eksekusi kebijakan dari kekuasaan yang berlangsung transparan, membuat publik mengetahui persis akibat yang akan mereka terima dari kebijakan penguasa. Metafor ini seringkali diasosiasikan dengan laporan investigasi, pekerjaan jurnalis yang independen yang bekerja secara keras dan cerdas serta seringkali menggali rahasia dan mengungkap kasus korupsi.

Kedua, memberikan ruang untuk munculnya perdebatan mengenai kebijakan publik. Dalam tahapan ini media dapat berperan aktif dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keseluruhan tahap kebijakan publik yang telah dilakukan yakni meliputi proses perumusan kebijakan hingga evaluasi kebijakan.

Ketiga, sebagai institusi yang mempublikasikan mengenai kompetisi elit dan konflik yang terjadi sehingga membantu warganegara memahami aktor-aktor yang bermain dan hal yang dipertaruhkan

Keempat, melakukan mediasi antar aktor dalam proses-proses politik di tingkat lokal, yakni dengan cara memediasi komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan lembaga legislatif daerah. Peran ini dapat membuat pemerintah lokal responsif terhadap kehendak masyarakat begitupun sebaliknya.

Media Massa dan Konstruksi Realitas Sosial

Ketika membicarakan konstruksi realitas sosial, Berger dan Luckmann merupakan akademisi yang sering dirujuk untuk mengulas mengenai hal ini, melalui karya mereka *The Social Construction of Reality* yang mengkaji mengenai pembentukan realitas oleh masyarakat, mereka mengemukakan klaim bahwa masyarakat hidup di dalam realitas objektif dan subjektif sekaligus. Menurut mereka mustahil suatu kesadaran mengenai sesuatu akan muncul tanpa terlebih dahulu bersinggungan dengan obyek tertentu. Karena kesadaran itu selalu bersifat intensional, dalam arti kesadaran selalu terarah pada suatu obyek (Berger & Luckmann, 2013: 29).

Dengan kata lain, mereka berpendapat bahwa proses konstruksi realitas terjadi ketika seseorang melakukan pengamatan terhadap suatu benda (objektifikasi). Kemudian hasil pemaknaan melalui persepsi tersebut diinternalisasikan kedalam diri pengamat. Dalam tahapan ini dilakukan konseptualisasi terhadap suatu objek yang dipersepsikan (Berger & Luckmann, 2013: 36).

Adoni dan Mane (1984) dalam karyanya *Media and The Social Construction of The Reality* memaparkan bahwa peran media massa dalam proses konstruksi sosial memiliki tempat yang penting. Mereka berpendapat bahwa terdapat dua pendekatan dalam penelitian komunikasi yang berkembang selama ini mengenai peran media. *Pertama*, mereka yang lebih memfokuskan konstruksi atas realitas sosial sebagai aspek penting terkait relasinya dengan budaya dan masyarakat. *Kedua*, mereka yang memfokuskan pada konstruksi atas realitas sosial sebagai salah satu bentuk pengaruh media. Mereka menyarankan untuk memadukan kedua pendekatan tersebut dalam kerangka teori yang umum. Kerangka teoritis ini memberikan

landasan yang kuat untuk melakukan analisis realitas simbolik yang ditampilkan media yakni sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dari proses konstruksi realitas sosial yang memberi peran penting pada media massa.

Intinya, media massa tidak serta merta mencerminkan secara keseluruhan mengenai segala hal yang terjadi di dalam dunia yang kita hidupi. Melainkan terdapat seleksi atas kenyataan hidup yang diamati. Seleksi ini bergantung pada nilai-nilai selektifitas yang dianut oleh sistem media massa itu sendiri sebelum kemudian dimuat dan disajikan kepada publik.

Relasi Narasumber, Jurnalis dan Berita

Street (2001) dalam Kramer (2011: 62) mengemukakan bahwa media secara konseptual tidak dapat dipisahkan dengan apa yang dilaporkannya, hal ini berkaitan dengan bagaimana suatu hal dilaporkan serta bagaimana suatu hal dibingkai. Jurnalisme merupakan sebuah aktifitas yang melibatkan struktur yang dibentuk oleh sumber daya, berkaitan kepentingan publikasi dan atas pertimbangan ketersediaan sumber material yang mereka miliki. Demikian, narasumber berita diandaikan sebagai salah satu sumber daya yang utama dalam membentuk berita. Singal (1986) dalam Tiffen et.al (2014:375) bahkan menyatakan bahwa: "*sources makes the news*"—sumber berita membentuk berita.

Oleh karena itu, banyak yang memandang relasi jurnalis-narasumber berita merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Yakni jurnalis memperoleh sumber daya untuk membuat berita. Sedangkan narasumber berita juga memiliki panggung untuk pendapatnya bisa didengar oleh masyarakat.

Potensi saling menguntungkan dari hubungan narasumber-jurnalis ini tidak bermasalah jika tidak mempengaruhi kemampuan jurnalis untuk bertindak demi kepentingan umum. Karena itu, jurnalis dituntut untuk dapat melampaui informasi yang diberikan oleh sumber berita, yakni dengan cara melakukan verifikasi fakta dengan

menggunakan informasi dari sumber lain, juga memanfaatkan data primer maupun sekunder lainnya untuk memperoleh pandangan yang lebih menyeluruh akan sebuah peristiwa. Akan tetapi seperti yang dikatakan oleh Singal (1986)—narasumberlah yang dominan membentuk berita dibandingkan jurnalis itu sendiri.

Hal itu berkesesuaian dengan studi mengenai pers lokal yang dilakukan Walter Gieber (1964) dalam O'Neill & O'Connor (2008: 488), studi tersebut menemukan bahwa jurnalis meski percaya bahwa mereka merupakan individu yang bebas, yang menemukan dan menyelidiki cerita mereka sendiri, jarang bersikap independen terhadap narasumbernya. Mereka membuat cerita hanya berdasarkan informasi yang diberikan oleh narasumber semata.

Pembahasan

Pemilihan Narasumber Berita dalam Kasus Korupsi Fuad Amin Imron

Tanpa adanya narasumber, media berita tidak akan dapat beroperasi. Ungkapan Simon Cottle: "*Who gets 'on' or 'in the news is important-very important indeed*" (Cottle, 2000: 427 dalam Franklin, 2011: 91), memperlihatkan bagaimana pentingnya peran narasumber di dalam proses produksi berita. Karena itu, bagian ini memaparkan siapa saja narasumber yang dirujuk dalam berita korupsi Fuad Amin. Bagaimana pendapat narasumber dikutip di dalam berita. Serta apa saja alasan yang menjadi pertimbangan pemilihan narasumber berita.

Untuk memudahkan analisis, peneliti membagi tiga kategori narasumber yakni narasumber pro, kontra dan netral. Narasumber pro adalah narasumber yang pernyataannya menunjukkan keberpihakkannya terhadap Fuad Amin. Keberpihakkan tersebut ditunjukkan dengan beragam cara seperti melakukan demonstrasi atas penangkapannya, memberikan penilaian positif terhadap sosok Fuad Amin. Selanjutnya narasumber kontra adalah narasumber yang mengeluarkan pernyataan mendukung dan bersyukur atas kinerja KPK yang mampu menjerat Fuad Amin, serta

memberikan penilaian negatif atau tidak menguntungkan bagi Fuad Amin. Sedangkan narasumber netral adalah narasumber yang mengeluarkan pernyataan yang tidak memiliki pretensi kepentingan, yakni tidak memberikan penilaian positif maupun negatif terhadap isu yang berkembang atas kasus korupsi yang melibatkan Fuad Amin.

Dari total 42 narasumber yang dirujuk, kategori narasumber netral paling banyak dipilih, yakni sebanyak 28 orang atau 66,67%. Kemudian narasumber terbanyak diposisi kedua ditempati oleh narasumber pro yakni sebanyak 10 orang atau 23,81%. Sedangkan narasumber dalam kategori kontra hanya dihadirkan oleh JPRM sebanyak 4 orang atau 9,52%. Jika dilihat dari total frekuensi kumulatif pengutipan narasumber adalah sebanyak 77 kali. Dari total frekuensi tersebut, kategori narasumber netral

paling banyak dikutip dalam pemberitaan, yakni sebanyak 55 kali atau 71,43%. Kemudian disusul narasumber pro yang dikutip dalam pemberitaan sebanyak 17 kali atau sebesar 22,08%. Sedangkan kategori narasumber kontra hanya dikutip sebanyak 4 kali atau sebesar 6,49%. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut.

Narasumber Netral

Narasumber netral menjadi narasumber yang paling banyak dirujuk dalam pemberitaan korupsi yang melibatkan Fuad Amin. Aparat penegak hukum yang berasal dari kepolisian dan pejabat KPK menjadi yang paling dominan. Disamping itu, beberapa kalangan birokrat juga menjadi narasumber dalam kategori ini. Adapun narasumber yang termasuk dalam kategori ini dapat dilihat pada tabel.1.

Tabel. 1. Daftar Narasumber Netral

No	Nama	Jabatan
1.	Kompol Yanuar Herlambang	Wakil Kepala Polres Bangkalan;
2.	Kompol Abdul Rokhim	Kepala Bagian Operasional Polres Bangkalan
3.	AKBP Sulistyono	Kepala Polres Bangkalan
4.	Kombes Pol Setija Junianta	Kepala Polrestabes Surabaya
5.	Johan Budi	Juru bicara KPK
6.	AKBP Novel Bawesdan	Penyidik KPK
7.	Anonim	tim KPK
8.	Kompol Eko	Pimpinan Penyidik KPK
9.	Joeli Soelistiyanto	Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan
10.	Darul Hasyim	Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sumenep
11.	Tommy Feriyanto	Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Bangkalan
12.	Eddy Moeljono	Sekretaris Kabupaten Bangkalan
13.	Mohni	Pelaksana Harian Sekkab Bangkalan
14.	Fadhur Rosi	Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Bangkalan
15.	Abd. Razak	Kadispertanak Bangkalan
16.	Samsul Arifin	Camat Kec. Labang
17.	Faisol	Camat Kec. Kamal
18.	Salman Hidayat	Camat Kota Bangkalan

Sumber: hasil pengolahan data oleh peneliti

Narasumber Pro

Baik dari segi jumlah, maupun dari segi frekuensi, narasumber pro lebih banyak diakomodir di dalam pemberitaan dibandingkan dengan narasumber kontra. Hal ini tentu saja masih terkait dengan pedoman yang dipegang

JPRM yakni bahwa orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Fuad Amin merupakan sumber sekunder yang lebih diprioritaskan untuk hadir di dalam pemberitaan. Adapun narasumber yang termasuk dalam kategori ini dapat dilihat pada tabel. 2

Tabel. 2 Daftar Narasumber Pro

No	Nama	Jabatan
1.	Makmun Ibnu Fuad	Bupati Bangkalan (anak kandung Fuad Amin)
2.	Abdul Latif Amin Imron	Ketua DPC PPP Kabupaten Bangkalan, Wakil Ketua DPRD Bangkalan (adik kandung Fuad Amin)
3.	Haryono Abdul Bari	Mantan Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur
4.	Imron Rosyadi	DPC Partai Gerindra
5.	KH. Syarifuddin	Juru Bicara Keluarga Fuad Amin
6.	KH Hasani Zubair Muntashor	Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan
7.	Said Abdullah	Anggota Fraksi PDI Perjuangan
8.	Moh. Muskib Abdullah Abas	Koordinator aksi Gempur (berdemonstrasi menolak penangkapan Fuad Amin)
9.	Joko	Warga kampung Sasak, Kota Bangkalan

Sumber: hasil pengolahan data oleh peneliti

Narasumber Kontra

Sedangkan narasumber yang berposisi dengan Fuad Amin dilihat dari segi jumlah maupun frekuensi pengutipan paling sedikit diakomodir dalam pemberitaan. Dari total 42 narasumber, hanya empat orang saja merupakan narasumber kontra. Narasumber dari kategori ini dianggap tidak penting untuk pandangannya dapat hadir dalam berita, yakni berada pada kategori tersier. Hal ini karena dalam pandangan JPRM narasumber yang berposisi dengan Fuad Amin dipandang tidak memiliki kaitan dengan peristiwa korupsi melainkan hanya berrelasi dalam konteks politik. Dengan kata lain JPRM memandang kasus korupsi yang melibatkan Fuad Amin tak ada sangkut pautnya dengan masalah politik.. Adapun narasumber dalam kategori ini di antaranya adalah: Imam Bukhori Kholil, Pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Kholil serta merupakan sepupu dari Fuad Amin; Aliman Haris, mantan Sekretaris B DPRD periode 2004-2009; M. Muhri, Ketua GP Anshor Kab. Sumenep; KH. A. Shafraji, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Sumenep.

Narasi Berita Korupsi JPRM: Fuad Amin Tak Bersalah, Ia Berjasa Besar bagi Masyarakat Bangkalan

Sebelumnya telah dipaparkan bahwa narasumber netral merupakan narasumber yang

paling banyak dirujuk, baru kemudian menyusul narasumber pro dan terakhir narasumber kontra. Terlalu dominannya narasumber netral dan narasumber pro yang dirujuk dalam pemberitaan akhirnya berpengaruh kuat terhadap narasi berita yang dibuat oleh JPRM atau bahkan dapat dikatakan bahwa narasumber dari kedua kategori inilah yang “menyetir” keseluruhan narasi berita. Kuatnya pengaruh narasumber tersebut dapat dilihat pada penggalan berita di bawah ini.

(KH. Syarifuddin)...keluarga berharap para penegak hukum bisa bersikap adil dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. ”Mengharapkan penegak hukum menjunjung keadilan dan tata cara yang sopan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta kemanusiaan,” harapnya. (Tangis Ra Momon Pecah, *Jawa Pos Radar Madura*, 6 Desember 2014).

Penggalan berita tersebut menarasikan bahwa masyarakat harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Fuad Amin. Yang dimaksud asas praduga tak bersalah adalah bahwa seseorang tidak dapat dikatakan bersalah

sebelum seseorang ditetapkan oleh hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berita tersebut mengutip bulat-bulat pendapat yang diberikan oleh KH. Syarifuddin—juru bicara keluarga Fuad Amin.

Melalui berita tersebut masyarakat seolah dihibau agar jangan menilai Fuad Amin bersalah. Tetapi perlu diketahui sebenarnya bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak semua perkara hukum pidana mutlak harus memenuhi asas praduga tidak bersalah atau dengan kata lain asas ini boleh disimpangi. Terdapat kasus-kasus tertentu atau kasus-kasus yang butuh penanganan luar biasa seperti delik yang berkenaan dengan pemberian (*gratification*) yang berkaitan dengan suap (*bribery*), kasus korupsi dan pencucian uang dapat diselenggarakan berdasarkan asas praduga bersalah (Bachtiar, 2015: 10-13). Tak terkecuali kasus dugaan korupsi yang disangkakan terhadap Fuad Amin.

Narasi lain yang coba disuguhkan adalah mengenai besarnya jasa Fuad Amin bagi masyarakat Bangkalan. Hal itu terlihat dapat penggalan berita di bawah ini.

...prestasi dan karya Fuad Amin selama menjadi pemimpin di Bangkalan sangat nyata dan banyak. Berdasar catatan Gempur, Fuad Amin telah menorehkan 270 penghargaan dari berbagai even tingkat lokal, regional, dan nasional... ”Jasa Fuad Amin begitu terasa bagi masyarakat Bangkalan,” tegas Moh. Muskib Abdullah Abbas. (“Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah”, *Jawa Pos Radar Madura*, 30 Desember 2014)

Berita tersebut hanya berfokus pada ratusan prestasi yang diraih Fuad Amin. Sama sekali tidak dikemukakan beberapa catatan kasus yang pernah disangkakan terhadap Fuad Amin, seperti dugaan pemalsuan ijasah, dugaan korupsi pengungsi Sampit dan Sambas; serta beberapa kasus lain yang pernah disangkakan terhadapnya.

Hal ini terjadi karena dalam berita tersebut Moh. Muskib merupakan satu-satunya narasumber yang dihadirkan JPRM dalam berita, sehingga seluruh berita merupakan opini dari satu pihak, yakni pihak pendukung Fuad Amin.

Narasi bahwa Fuad Amin tidak bersalah sangat dominan muncul dalam pemberitaan JPRM. Narasi Fuad Amin sebagai individu yang tidak bersalah terus menerus diketengahkan. Adapun penggalan berita tersebut adalah sebagai berikut.

(Makmum Ibnu Fuad)...Meski dirinya memintakan maaf atas sang ayah, namun Ra Momon meminta seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. sebelum ada keputusan hukum, sang ayah belumlah bisa dikatakan salah. (Berbincang Dengan Ra Momon di Tengah Kasus Hukum Sang Ayah: Minta Maaf, Pastikan Roda Pemerintahan Tetap Berjalan, *Jawa Pos Radar Madura*, 4 Maret 2015).

Narasi tersebut merupakan sebuah upaya untuk mengindarkan penilaian negatif terhadap citra Fuad Amin. Selain itu, guna meredam amarah masyarakat terhadap dugaan tindakan suap dan pencucian uang yang disangkakan terhadap Fuad Amin, permohonan maaf juga dikemukakan oleh Makmum Ibnu Fuad mewakili ayahnya, meski permohonan maaf tersebut tidak dilakukan dalam rangka mengakui kesalahan Fuad Amin terkait kasus yang membelitnya.

Amat disayangkan pasca penetapan vonis bersalah Fuad Amin pada tanggal 19 Oktober 2015 JPRM sama tidak membuat berita terkait hal itu. Padahal menjadi hal penting dilihat bagaimana tanggapan masyarakat dan opisisi terkait penetapan vonis tersebut. Selain itu, narasumber pro yang selama ini mendukung Fuad Amin yang sebelumnya berpendapat bahwa Fuad Amin merupakan pribadi yang tidak

bersalah perlu juga untuk pendapatnya didengar kembali.

Alasan Pemilihan Narasumber

Berdasarkan wawancara dengan Fery Ferdiansyah, wartawan senior JPRM, juga mantan redaktur JPRM pada 31 Januari 2017. Ia menjelaskan bahwa JPRM dominan menghadirkan narasumber netral berdasarkan pertimbangan ketertarikan masyarakat. Menurutnya masyarakat lebih tertarik untuk mengetahui bagaimana kasus kasus Fuad Amin ditangani secara hukum; bagaimana tanggapan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Fuad Amin; serta bagaimana peristiwa penangkapan & penyitaan itu berlangsung. Dibandingkan informasi mengenai pihak oposisi/kontra dengan Fuad Amin.

Ketertarikan masyarakat terkait tema-tema dalam kasus korupsi ternyata menjadi landasan utama mengapa JPRM lebih condong untuk meliput berita korupsi Fuad Amin dari aspek hukum dan aspek personal saja. JPRM menilai kedua aspek tersebut lebih memiliki nilai berita dan berpotensi untuk menarik pembaca. Demikian JPRM mengesampingkan tugasnya sebagai institusi pers yang seharusnya menyuguhkan berita yang menyeluruh terkait suatu kasus korupsi. Misalnya siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi, bagaimana tanggapan oposisi seperti LSM, rival, sebagian masyarakat yang kontra dengan Fuad Amin terkait kasus tersebut. Dampak-dampak sistemik apa saja yang disebabkan oleh korupsi Fuad Amin dan lain sebagainya.

Peneliti kemudian mengajukan pertanyaan perihal dominannya narasumber dari kategori netral dan pro dalam berita korupsi Fuad Amin dibandingkan dengan narasumber kontra. Peneliti juga mempertanyakan bagaimana prinsip jurnalisme *cover both side* (narasumber berimbang) atau bahkan *cover all side* (banyak narasumber) dipraktikkan, ia menjawab sebagai berikut:

“...di dalam jurnalisme itu terdapat tingkatan sumber berita mbak, jadi ada sumber

berita primer, sekunder dan tersier. Nah Ra Imam (Imam Bukhari Khalil: rival Fuad Amin) ini menjadi sumber tersier, jadi bukan menjadi bagian penting dalam kasus Ki Fuad. Dalam kasus Ki Fuad itu, yang menjadi sumber primer adalah KPK yang melakukan penangkapan yah. Yang kedua adalah Ra Fuad sendiri, tapi kita tidak punya akses untuk wawancara Ra Fuad. Kemudian, sekunder..ya kni orang-orang disekitarnya...Ra Fuad ini juga ayah dari seorang Bupati, kita gunakan bupati (sebagai narasumber). Jadi oposisi pada saat itu saya pikir dia ada di tersier...” (Wawancara, Fery Ferdiansyah 31 Januari 2017).

Petikan wawancara di atas menunjukkan bahwa seleksi narasumber berita yang dilakukan JPRM berdasarkan atas prinsip tingkatan sumber berita. Yakni sumber primer, sekunder dan tersier. Menurut JPRM sumber primer/paling penting adalah KPK dan Fuad Amin. Kemudian sumber sekunder adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Fuad Amin. Kemudian sumber tersier adalah kelompok oposisi termasuk Imam Bukhari Khalil. Konsep seleksi berita berdasarkan tingkatan narasumber tersebut sebenarnya telah lama mendapatkan kritik. Tiffen (1978: 163) dalam Wiendijarti (2008: 36), misalnya mengemukakan bahwa berita yang hanya mengakomodir kalangan birokrat, maka sumber informasi akan menggiring pada pemahaman isi berita yang juga berperspektif kalangan birokrat. Kritik lainnya juga dilontarkan oleh Hall (1974) dan Hall et al. (1978) dalam Tiffen et. al (2013: 2), mereka menyebutkan bahwa kemampuan sumber elit untuk mengakses media berita membuat pandangan sumber elit menjadi dominan atas diskusi publik yang terjadi di masyarakat, yakni berita cenderung lebih

mengutamakan pandangan sumber elit dari pada pandangan elemen-elemen masyarakat yang lain. Karena itu, tak mengherankan jika berita yang disajikan JPRM tak ubahnya berfungsi sebagai corong kelompok pro seperti anaknya Makmun Ibnu Fuad dan keluarganya dalam menutup-nutupi kesalahan Fuad Amin sembari juga terus mengemukakan narasi bahwa Fuad Amin amat berjasa besar bagi masyarakat Bangkalan.

Selain dua alasan pemilihan narasumber di atas, terdapat alasan lain mengapa narasumber netral & pro yang dominan dirujuk. Adapun alasannya adalah sebagai berikut.

“...ketika Ki Fuad ditangkap mbak, kubu Ki Fuad ini masih kuat. Itu bisa dibuktikan dengan adanya istigosah, adanya pertemuan-pertemuan. Jika kami Radar mengambil narasumber dari orang-orang yang oposisilah anggap seperti itu... Tentu akan membuat kisruh Bangkalan.. Kita khawatirkan terjadi bukan kita mengungkap secara transparan bagaimana penanganan hukum tetapi kita akan mengiring konflik horisontal...”
(Wawancara, Fery Ferdiansyah 31 Januari 2017).

Secara tersirat faktor keamanan jurnalis dan organisasi media menjadi pertimbangan mengapa narasumber dari kategori oposisi sangat sedikit dirujuk dalam berita korupsi. Hal itu terlihat dari kutipan wawancara di atas yang menggambarkan bahwa: “...kubu Ki Fuad ini masih kuat...”. Terdapat kekhawatiran jurnalis JPRM akan mengalami tindak kekerasan jika memberitakan pendapat oposisi. Hal tersebut sangat beralasan karena kasus kekerasan terhadap jurnalis di Jawa Timur cukup tinggi. Laporan AJI (2007-2011) menyebutkan bahwa wilayah Jawa Timur menduduki peringkat kedua tertinggi, yakni sebanyak 35 kasus kekerasan (advokasi.aji.or.id, 2016). Apalagi wilayah Bangkalan dikuasai oleh *blater* (orang kuat lokal) yang sudah umum diketahui memiliki

hubungan *patron-client* dengan Fuad Amin (Rozaki, 2009: 9). Selain itu, Fery juga berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan agar tidak memunculkan konflik horisontal di masyarakat. Argumentasi Fery tersebut tentu perlu ditinjau dengan kritis, yakni dengan berlandung dalih mencegah pecahnya konflik horisontal, JPRM mengorbankan hak masyarakat untuk mengetahui beragam sudut pandang yang seharusnya turut diketengahkan dalam narasi berita yang dibuat oleh JPRM. Alasan yang dikemukakan kurang melihat realitas kondisi Bangkalan kala itu, kondisi Bangkalan cukup kondusif, hal tersebut terlihat dari penangkapan Fuad Amin yang dilakukan aparat penegak hukum tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti.

Simpulan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa narasumber netral & narasumber pro pendapatnya dominan dirujuk baik dari segi jumlah maupun dari segi frekuensi pengutipan di dalam pemberitaan korupsi Fuad Amin. Dominannya narasumber netral dan narasumber pro akhirnya mempengaruhi narasi berita korupsi yang dibuat oleh JPRM. Berita korupsi yang diproduksi oleh JPRM utamanya menjadi corong narasumber pro seperti Makmun Ibnu Fuad, KH. Syarifuddin serta narasumber pro lainnya untuk pandangannya dapat terartikulasikan di dalam berita. Teknik pengutipan secara bulat-bulat terhadap segala hal yang disampaikan oleh narasumber tanpa mencari informasi tambahan terkait kebenaran yang disampaikan membuat narasumber memiliki kuasa lebih dalam menentukan narasi berita korupsi Fuad Amin.

Sikap skeptis terhadap keterangan narasumber sama sekali tidak dipraktikkan dalam jurnalisme korupsi yang dilakukan oleh jurnalis JPRM. Adapun narasi dominan yang coba diketengahkan oleh narasumber pro adalah narasi bahwa Fuad Amin bukanlah orang yang bersalah, ia harusnya dipandang sebagai orang yang telah banyak berprestasi dan juga memiliki jasa yang amat besar bagi masyarakat Bangkalan. Mengingat kalangan kontra terhadap

Fuad Amin amat minim dirujuk dalam berita akhirnya narasi kritis terhadap penangkapan Fuad Amin tidak muncul dalam pemberitaan.

Terdapat beberapa alasan JPRM hanya dominan merujuk narasumber dari kalangan netral dan pro Fuad Amin. Pertama, alasan nilai berita. Yakni aspek hukum dan personalisasi dipandang sebagai peristiwa yang memiliki nilai berita. Akhirnya narasumber dari kalangan hukum dan keluarga dekat yang dianggap penting untuk suaranya muncul dalam pemberitaan. Kedua, prinsip tingkatan narasumber. JPRM memandang yang merupakan narasumber primer adalah KPK dan Fuad Amin. Sedangkan narasumber sekunder adalah keluarga dekat Fuad Amin. Sedangkan narasumber kontra dinilai tidak penting untuk dirujuk karena termasuk dalam narasumber tersier. Ketiga, pertimbangan keamanan jurnalis. Kekuasaan Fuad Amin di Bangkalan yang telah mengakar dipandang membuat jurnalis berhati-hati dalam pemberitaannya. Sehingga narasumber yang beropisisi dengan Fuad Amin pendapatnya amat sedikit dirujuk dalam pemberitaan.

Daftar Pustaka

- Adoni, Hannah & Sherill Mane. 1984. *Media and The Social Construction of The Reality*. Journal Communication Research, Vol. 11, No. 3 (323-340).
- aji.or.id. 2015. *Data Kekerasan*. Dalam <http://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan>. Diakses pada 25 Agustus 2016
- Aldridge, Meryl. 2007. *Understanding the Local Media*. New York: Open University Press.
- Berger, L Peter & Thomas Luckmann. 2013. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Franklin, Bob. 2011. *Sources, Credibility and the Continuing Crisis of UK Journalism* dalam Franklin Bob & Matt Carlson (Eds). *Journalists, Sources and Credibility: New Perspectives*. New York: Routledge.
- Hughes, Kirrlee. 2001. *Laporan Studi Lapangan Wajah Pers Malang*. Universitas Muhammadiyah Malang dan Australian Consortium for in-Country Indonesian Studies.
- Kramer, Elisabeth. 2011. *When news becomes entertainment: Representations of corruption in Indonesia's media and the implication of scandal*. Media Asia Research. 62-72.
- O'Neil, Deirde & Cathrine O'Connor. (2008). *The Passive Journalist: How sources dominate local news*. Journalism Practice, Vol. 2, No 3, 2008.
- Renaldi, Taufik, Marini Purnomo, Dewi Damayanti. 2007. *Memerangi Korupsi di Indonesia Yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah*. Justice for the Poor Project Bank Dunia melalui <http://siteresources.worldbank.org/INTJUSFORPOOR/Resources/FightingCorruptioninDecentralizedIndonesia.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016.
- Rianto, Puji. (2006). *"Pers Daerah, Profesionalisme, dan Demokrasi Lokal"*. Dalam *Rahayu*. 2006. *Menyingkap profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*. Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, Dewan Pers, dan Departemen Komunikasi dan Informasi.
- Rozaki. Abdur. (2009). *Social Origin dan Politik Kuasa Blater di Madura*. Kyoto Review of Southeast Asia Issue 11 Desember 2009.
- Tiffen, Rodney, Paul K. Jones, David Rowe, Toril Aalberg, Sharon Coen, James

- Curran, Kaori Hayashi, Shanto Iyengar, Gianpietro Mazzoleni, Stylianos Papathanassopoulos, Hemando Rojas, and Stuart Soroka. (2014). *Sources In the News: A Comparative Study*. *Journalism Studies*, Vol. 15, No. 4, 374-391, 2014
- Wiendijarti, Ida. (2008). *Pengaruh Kredibilitas Narasumber Berita Politik terhadap Internalisasi Nilai Berita Politik pada Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 6, Nomor 2, Mei-Agustus 2008.
- Jawa Pos Radar Madura*, 3 Desember 2014, "Akhir Tuhan Kedua."
- Jawa Pos Radar Madura*, 6 Desember 2014, "Tangis Ra Momon Pecah."
- Jawa Pos Radar Madura*, 30 Desember 2014, "Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah."
- Wawancara melalui telepon dengan Fery Ferdiansyah Kepala Biro Sampang (menjabat sebagai Pimpinan Redaksi kala kasus Fuad Amin bergulir), 31 Januari 2017.